

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kinerja pelaksanaan kebijakan pemantauan Tenaga Kerja Asing di Kota Surabaya. Sedangkan permasalahan yang ingin dijawab adalah Bagaimana kinerja pelaksanaan kebijakan pemantauan Tenaga Kerja Asing di Kota Surabaya? Kebijakan pemantauan Tenaga Kerja Asing di Kota Surabaya dibuat oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui Keputusan Walikota Surabaya No. 188.45/220/436.1.2/2017 Tentang Tim Koordinasi Pemantauan Keberadaan dan Kegiatan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing, dan Tenaga Kerja Asing di Kota Surabaya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Lokasi penelitian yang di pilih adalah Kota Surabaya. Penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive* yang selanjutnya dilanjutkan dengan teknik *snowball*. Kemudian, untuk menguji keabsahan data penelitian digunakan teknik triangulasi data. Sedangkan proses analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian evaluasi ini menunjukkan bahwa kinerja pelaksanaan pemantauan Tenaga Kerja Asing di Kota Surabaya masih belum berjalan dengan maksimal karena 5 (lima) kriteria evaluasi dalam penilaian (*assessment*) tidak sesuai dengan kinerja yang diharapkan. Kurang efektif karena lemahnya tindakan preventif dan kemampuan pendeteksian/pengidentifikasian keberadaan dan kegiatan TKA serta pemberi kerja oleh Tim POA, pemberian sanksi yang tidak tegas dan menimbulkan efek jera bagi TKA dan pemberi kerja TKA, dan adanya sifat ego sektoral dari instansi anggota Tim POA. Belum efisien karena kualitas SDM yang masih rendah, adanya Tim PORA dalam pengawasan Tenaga Kerja Asing di Kota Surabaya, dan minimnya kesadaran dari anggota Tim POA untuk berbagi informasi ke anggota tim yang lain terkait keberadaan dan kegiatan TKA dan pemberi kerja TKA. Kriteria kecukupan masih kurang karena alih pengetahuan dan alih teknologi tidak memberikan manfaat bagi tenaga kerja pendamping. Kriteria ketepatan tidak sesuai karena kurang bermanfaat dalam menjaga Kota Surabaya dari TKA yang dipekerjakan pemberi kerja TKA tanpa disertai dokumen. Kriteria proses tidak sesuai karena ada tahapan prosedur yang tidak berjalan maksimal.

Kata kunci: Kebijakan Publik, Evaluasi Kebijakan Publik, Tenaga Kerja Asing.

ABSTRACT

This research aims to describe the performance of the implementation of the Foreign Workers Monitoring Policy in Surabaya. While the problem that want to be answered is how the implementation of the Foreign Workers Monitoring Policy perform in Surabaya City? Foreign Worker Monitoring Policy in Surabaya City was made by Surabaya City Government through Decree of Mayor of Surabaya. 188.45 / 220 / 436.1.2 / 2017 About the Coordinate Team for Monitoring the Existences and Activities of Foreigners, Foreign Communities Organizations, and Foreign Workers in Surabaya.

The method used in this research is qualitative with the type of descriptive research. The selected location for this research is the Surabaya City. Informant determination was done by purposive technique which then continued with snowball technique. Then, to test the validity of research data used data triangulation techniques. While the process of data analysis is done by data reduction, data presentation, and conclusion.

The results of this evaluation research show that the performance of the monitoring of Foreign Workers in Surabaya City is still not running maximally because 5 (five) evaluation criteria in the assessment is not in accordance with the expected performance. Less effective due to the weakness of preventive action and detection capability / identification of the presence and activities of foreign workers and employers by the POA Team, improper sanctions and deterrent effects for foreign workers and employers, and the egosektoral nature of POA Team members. Inefficient because of the low quality of human resources, the PORA team in the supervision of Foreign Workers in Surabaya, and the lack of awareness of POA Team members to share information to other team members regarding the presence and activities of foreign workers and employers of TKA. Criterion of adequacy is still lacking because the transfer of knowledge and transfer of technology does not provide benefits for co-workers. The criterion of appropriateness is inappropriate because it is less useful in guarding the Surabaya City from foreign workers employed by foreign employers without documents. Criteria of process is not appropriate because there are stages of procedures that do not run optimally.

Keywords: *Public Policy, Public Policy Evaluation, Foreign Workers.*